

**PERAN PEMERINTAHAN DESA DALAM PENGELOLAAN BADAN USAHA  
MILIK DESA (BUMDES) DI DESA KUTA PADANG  
KECAMATAN SIMEULUE CUT  
KABUPATEN SIMEULUE**

**SKRIPSI**

**OLEH :**

**GUSTINA RAHMAYUNI**

**178510041**



**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIKUNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2021**

**PERAN PEMERINTAHAN DESA DALAM PENGELOLAAN BADAN USAHA  
MILIK DESA (BUMDES) DI DESA KUTA PADANG  
KECAMATAN SIMEULUE CUT  
KABUPATEN SIMEULUE**

**SKRIPSI**

Diajukan sebagai salah satu untuk memperoleh Gelar Sajana di Fakultas Ilmu  
Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area



**OUEH**

**GUSTINA RAHMAYUNI**

**178510041**

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN  
FAKULTAS ILMU SOSIAU DAN ILMU POUITIK  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
2021**

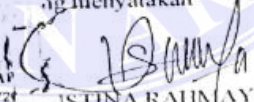
**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
TUGAS AKHIR/SKRIPSI/TEKST UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIKS**

Sebagai sivitas akademik universitas medan area, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Gustina Rahmayuni  
Npm : 178510041  
Program studi : Ilmu pemerintahan  
Fakultas : isipol  
Jenis karya : Skripsi

Dengan pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada universitas medan area **Hak Bebas Royalti Non-eksklusif ( Non- Exclusive Royalty-Free Right)** atas karya ilmiah saya yang berjudul : peran pemerintah Desa dalam pengelolaan badan usaha milik Desa (BUMDes) di Desa Kuta Padang Kecamatan Simeulue Cut Kabupaten Simeulue. Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan memublikasikan tugas akhir/skripsi/tesis saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Medan  
Pada tanggal : September 2021  
saya menyatakan

  
GUSTINA RAHMA YUNID

LEMBARAN PENGESAHAN

Judul skripsi : Peran Pemerintahan Desa dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)  
Desa Kuta Padang kecamatan Simeulue Cut Kabupaten Simeulue  
Nama : Gustina Rahmayuni  
NPM : 178510041  
Fakultas : Isipol

Disetujui oleh

Komisi pembimbing

Walid Musthafa, S.Sos, M.Ip  
Pembimbing 1

Evi yunita kurniaty, S.Sos, M.Ip  
pembimbing 2

Mengetahui

  
Smamto, MA  
Dekan

Evi yunita kurniaty, S.sos, M.Ip  
ka. Prodi/WD I

Tanggal lulus :

**PENGAJUAN KOMISI PEMBIMBING PENELITIAN**

Saya mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Politik Universitas Medan Area

Nama Gustina Rahmayuni

NPM 1705100041

Program Studi Ilmu Pemerintahan

Berencana akan melakukan penelitian dengan judul

1. Peran pemerintahan Desa dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Kuta Padang Kecamatan Simelide CUT, Kabupaten Simelide
2. Analisis kinerja Pegawai Kantor Desa dalam memberikan Pelayanan Administrasi kepada Masyarakat di Desa Kuta Padang Kecamatan Simelide CUT, Kabupaten Simelide.

Dengan dosen pembimbing

1. Maulid Taustafa, S.Sos. M.P.
2. Evi Yunita Kusniati, S.Sos. M.P.

Demikian surat permohonan pengajuan judul dan dosen pembimbing ini dibuat untuk dapat ditentukan oleh ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan

Medan, ..... 2019

Hormat Saya,

Judul Penelitian yang disetujui No ( )

Peran pemerintahan Desa dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Kuta Padang Kecamatan Simelide CUT, Kabupaten Simelide.

Dengan dosen pembimbing

1. Ketua/ Pembimbing I Maulid taustafa, S. sos. M. IP
2. Anggota/ Pembimbing II Evi Yunita Kusniati, S. Sos. M. IP
3. Sekretaris SAIRU

Catatan

Medan, ..... 2019

Disetujui oleh

Ketua Program Studi

  
Evi Yunita Kusniati, S.Sos. M.P.



### LEMBARAN PERNYATAAN

Saya bahwa skripsi yang saya susun ini adalah sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana (S1) ilmu pemerintahan di fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari berbagai sumber, telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah, dan etika dalam penulisan karya ilmiah.

Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila dikemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.

Medan, September 2021



  
Gustina Rahmayuni

178510041

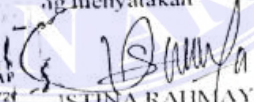
**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
TUGAS AKHIR/SKRIPSI/TESIS UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIKS**

Sebagai sivitas akademik universitas medan area, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Gustina Rahmayuni  
Npm : 178510041  
Program studi : Ilmu pemerintahan  
Fakultas : isipol  
Jenis karya : Skripsi

Dengan pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada universitas medan area **Hak Bebas Royalti Noneksklusif ( Non- Exclusive Royalty-Free Right)** atas karya ilmiah saya yang berjudul : peran pemerintah Desa dalam pengelolaan badan usaha milik Desa (BUMDes) di Desa Kuta Padang Kecamatan Simeulue Cut Kabupaten Simeulue. Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan memublikasikan tugas akhir/skripsi/tesis saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

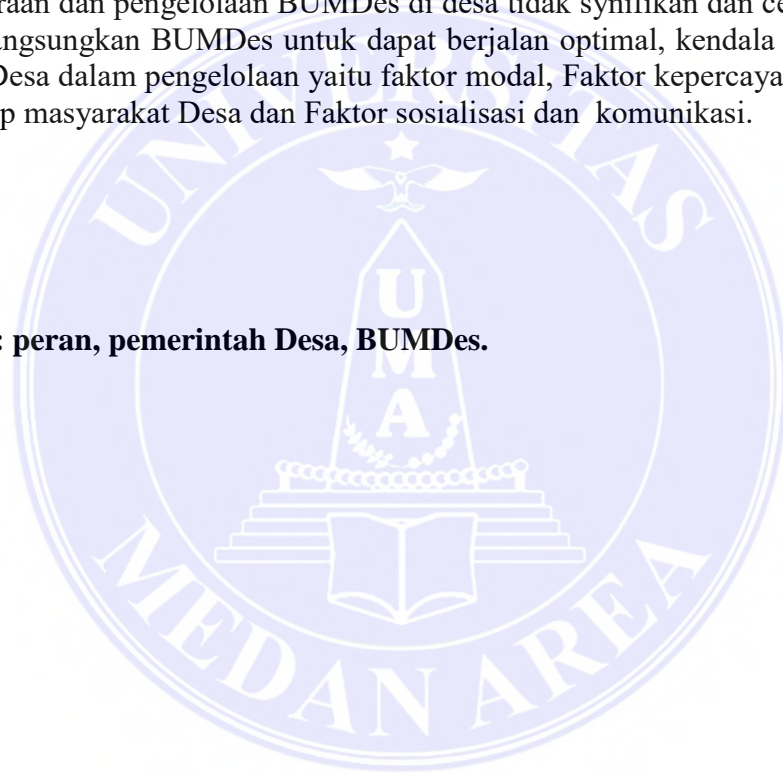
Dibuat di : Medan  
Pada tanggal : September 2021  
saya menyatakan

  
GUSTINA RAHMA YUNDI

## ABSTRAK

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintah Desa dalam upaya memperkuat perekonomian Desa. Pemerintah Desa Kuta Padang mendirikan BUMDes pada tanggal 10 Agustus 2016. BUMDes yang sedang di jalankan saat ini di Desa Kuta Padang mempunyai nama usaha yaitu *samo tananami*, adapun jenis usahanya yakni : simpan pinjam, perdagangan, perternakan, perkebunan dan penyewaan. Penelitian ini ingin melihat bagaimana peran pemerintah Desa dalam pembangunan dan pengembangan BUMDes tersebut. Dalam penelitian ini teori yang digunakan pada penelitian ini dari Kemudin John M. Ivancevich, Robert dan Michael T. Matteson, Teori pendukung dalam penelitian ini dari Soekanto, Sulitiawati. Metode penelitian deskriptif kualitatif melalui wawancara, observasi, serta dokumentasi. Penelitian ini terdiri dari informan kunci, utama dan tambahan. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa peran Pemdes dalam penyelenggaraan dan pengelolaan BUMDes di desa tidak signifikan dan cenderung tidak mampu melangsungkan BUMDes untuk dapat berjalan optimal, kendala yang dihadapi pemerintah Desa dalam pengelolaan yaitu faktor modal, Faktor kepercayaan Pemerintah Desa terhadap masyarakat Desa dan Faktor sosialisasi dan komunikasi.

**Kata kunci : peran, pemerintah Desa, BUMDes.**





## ABSTRACT

Village-Owned Enterprises (BUMDes) are village business institutions managed by the community and the village government in an effort to strengthen the village economy. The Kuta Padang Village Government established BUMDes on August 10, 2016. The BUMDes currently being run in Kuta Padang Village has a business name, namely *samo tananami*, as for the types of business namely: savings and loans, trading, livestock, plantations and leasing. This study wants to see how the role of the village government in the development and development of the BUMDes is. In this study, the theory used in this study was from Kemudin John M. Ivancevich, Robert and Michael T. Matteson, qualitative descriptive research methods through interviews, observation, and documentation. This study consisted of key, main and additional informants. The results of this study explain that the role of the Village Government in the implementation and management of BUMDes in the village is not significant and tends not to be able to carry out BUMDes to be able to run optimally, the obstacles faced by the village government in management are the capital factor, the trust factor of the village government towards the village community and the socialization and communication factor. .

**Keywords: role, village government, BUMDes.**

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala karuniaNya sehingga skripsi ini berhasil diselesaikan. Tema yang di pilih dalam penelitian ini ialah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dengan judul peran pemerintah Desa dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Kuta Padang Kecamatan Simeulue Cut Kabupaten Simeulue.

Untuk sampai pada tahapan ini, banyak sekali suka dan duka yang penulis rasakan. Demikian pula, telah banyak bantuan baik materi maupun sumbangan pemikiran dari berbagai pihak yang penulis terima. Oleh karena itu, dengan senantiasa memanjatkan puji syukur kehadiran illahi robbul Izazati, Allah SWT dengan segala ketulusan dan kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasi dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada yang terhormat :

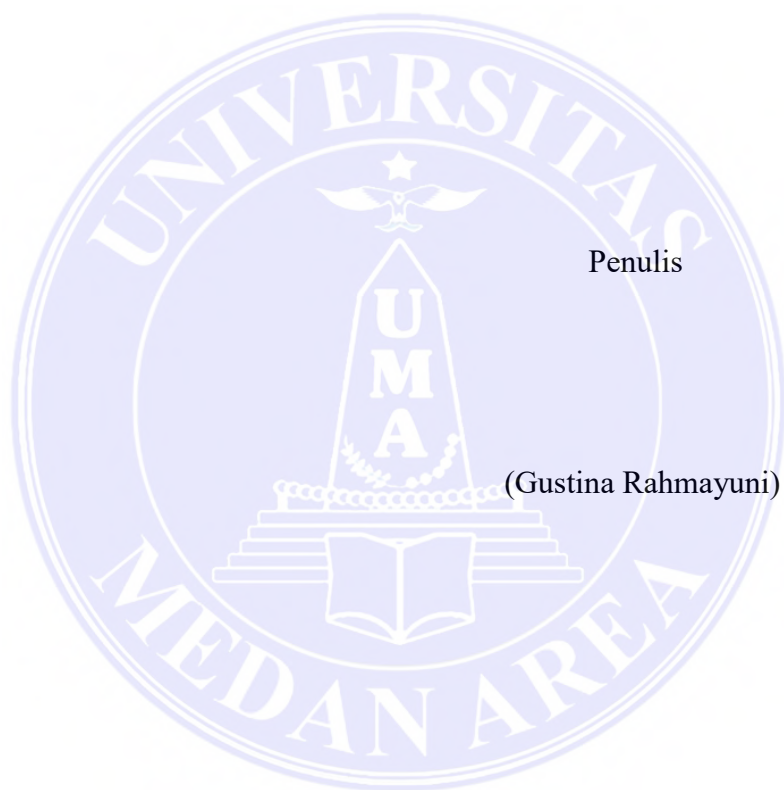
1. Rektor Universitas Medan Area, prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, M.sc selaku penanggung jawab penuh terhadap peroses belajar mengajar di lingkungan UMA.
2. Dekan Fakultas ilmu sosil dan ilmu politik Univeritas Medan Area, Bapak Heri Kusmanto. MA selaku penanggung jawab di lingkungan fakultas Ilmu social dan ilmu politik.
3. Ketua Jurusan Evi yunita Kurniaty, S.Sos, M.IP yang telah memberikan persetujuan awal pada skripsi ini.
4. Pembimbing 1 Walid Mustafa, S.Sos, M.IP yang telah memberikan motivasi, memberikan semangat, mengarahkan dan membimbing penulis sampai selesainya skripsi ini.

5. Pembimbing 2 Evi yunita Kurniaty, S.Sos, M.IP yang dengan sabar meluangkan waktu untuk membimbing penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
6. Kepada sekretaris saya bapak Saiful Bahri S.IP.M.SI yang telah membantu dan memberikan ilmunya kepada saya untuk membuat skripsi ini dengan baik dan benar.
7. Kedua orang tua tercinta, Ayah dan Ibu yang selalu mendoakan, menasehati, menyemangati, dan mengorbankan segalanya selama hidup demi penulis dan kelancaran pembuatan skripsi ini dan skripsi ini merupakan kebanggaan yang penulis persembahkan untuk Ayah dan Ibu.
8. Seluruh Dosen Fakultas Isipol yang selama ini telah menjadi guru yang sabar dalam mendidik mahasiswanya di bangku kuliah serta segenap karyawan yang telah membantu menyelesaikan seluruh administrasi.
9. Teman-teman Jurusan ilmu pemerintahan Angkatan 2017. Tri maya sari, Sri aprilia dewi, Isra hayati, Riski ramadan rambe, Ulfa maharani, Nur azizah, Isak pandingangan, Ummi khoiria, Beri giting, Dian lubis, Markus marbun, Iwan nainggolan, Dosma sijabat, Ayu situmeang, Afti anju bintang sinurat, Hotlas teguh pane Semoga sukses dan tidak lupa satu sama lain.
10. Kepada kakanda saya Gita Rahayu yang membatu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Kepada Dimas Mandala Putra yang telah membantu penulis dan memberi dukungan untuk menyelesaikan skripsi ini.
12. Kepada sahabat tercinta Nada inda Sari, Elsa Ria dan Nopi Elarianti yang banyak membatu penulis.

13. Teman serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah mendukung dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga segala kebaikan yang telah diberikan mendapat balasan yang sesuai dari Allah SWT.Amin.

Penulis menyadari ada banyak kesalahan dalam skripsi ini. Oleh karenanya kritik dan saran yang sangat membangun penulis harapkan sebagai pembelajaran untuk mencapai yang lebih baik di masa depan.



## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	i
<b>DAFTAR ISI</b> .....	ii
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	1v
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	V
<b>BAB 1 PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan Penelitian.....	5
1.4 Manfaat Penelitian.....	6
<b>BAB 11 TINJAWAN PUSTAKA</b>	
2.1 Pengertian peran .....	7
2.2 Pemerinta Desa.....	11
2.3 pemerintah Desa.....	11
2.3.1 pengerian pemerintah Desa.....	11
2.3.2 landasan hukum Pemerintah Desa.....	12
2.3.3 susunan organisasi pemerintahan Desa.....	13
2.3.4 wewenang kepala Desa.....	13
2.3.5 kewajiban kepala Desa.....	13
2.3.6 pertanggung jawaban kepala Desa.....	15
2.4 Kajian pengelolaan BUMDes.....	16
2.4.1 Pengetian pengelolaan.....	16
2.4.2 Pengertian BUMDes.....	16



2.4.3 Pendirian dan Pengelolaan BUMDes.....	17
2.4.4 Tujuan BUMDes.....	19
2.5 Penelitian Terdahulu.....	20
2.6 Kerangka Berpikir.....	22
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
3.1 Jenis Penelitian.....	24
3.2 Jenis dan Sumber Data.....	24
3.3 Lokasi Penelitian.....	25
3.4 Teknik Pengumpulan Data.....	26
3.5 Instrumen Penelitian.....	28
3.6 Teknik Analisis Data.....	29
3.7 Keabsahan Data.....	30
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN</b>	
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	32
4.1.1 Letak Geografis Desa Kuta Padang.....	32
4.1.2 Jumlah penduduk Desa Kuta Padang.....	33
4.1.3 Keadaan Ekonomi .....	33
4.1.4 Lembaga Ekonomi.....	35
4.1.5 Lembaga pendidikan.....	36
4.1.6 Tingkat Partisipasi Politik.....	36
4.1.7 Sara dan Prasarana.....	36
4.1.8 Struktur Pemerintah Desa Kuta Padang.....	38

4.2	Gambaran Umum Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Desa Kuta Padang.....	39
4.2.1	organisasi.....	39
4.2.2	Struktur organissasi BUMDes Kuta Padang.....	40
4.2.3	Sumber Daya Badan pengelolaan BUMDes Desa Kuta Padang.....	41
4.2.4	Visi Misi BUMDes BUMDes Kuta Padang.....	42
4.3	Hasil Penelitian.....	43
4.3.1	perogram BUMDes Desa Kuta Padang.....	43
4.3.2	Unit kegiatan Usaha BUMDes Desa Kuta Padang.....	44
4.3.3	Program BUMDes Desa Kuta Padang.....	47
4.3.4	Peran pemerintah Desa dalam pengelolaan BUMDes Desa Kuta Padang.....	48
4.3.5	Kendalah yang dihadapi Pemerintah Desa dalam pengelolaan BUMDes di Desa Kuta Padang.....	60
4.3.6	Kontribusi BUMDes terhadap Masyarakat Desa Kuta Padang.....	62
<b>BAB V PENUTUP</b>		
5.1	KESIMPULAN.....	65
5.2	SARAN.....	65
	DAFTAR PUSTAKA.....	66

## DAFTAR TABEL

Tabel 1. Jenis usaha BUMDes.....

Tabel 2. Informasi penelitian.....

Tabel 3. Letak Geografi.....

Tabel 4. Jumlah penduduk Desa Kuta Padang.....

Tabel 5. Mata pencarian pokok dan tenaga kerja.....

Tabel 6. Sarana kantor Desa, sarana ibadah, kesehatan dan Ekonomi.....

Tabel 7. Daftar Rekapitulasi BUMDes Kuta Padang, 2016-2021.....



## DAFTAR GAMBAR

- Gambar 1. kerangka berpikir.....
- Gambar 2. struktur organisasi pemerintah Desa Kuta Padang.....
- Gambar 3. Stuktur organisasi BUMDes Desa Kuta Padang.....



## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### 1.1 LATAR BELAKANG

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintah Desa dalam upaya memperkuat perekonomian Desa yang di bentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa, sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri Nomor 39 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa. Kemakmuran suatu Desa harus di dorong dengan adanya peningkatan perekonomian Desa, melalui berbagai kegiatan usaha ekonomi pedesaan. Pasal 87 ayat 1 UU Nomor 6 Tahun 2014 menjelaskan, Desa dapat mendirikan BUMDes.

Hubungan Pemerintah Desa dengan BUMDes yaitu perangkat Desa memiliki peran yang sangat penting dalam proses pendirian BUMDes tetapi peran itu sebagai fasilitator untuk menciptakan proses yang mampu membangun ruang partisipasi bagi warga desa. Proses itu dimulai dari bersosialisasi hingga terbetuknya kepengurusan BUMDes. Sebagai sebuah lembaga profesional, BUMDes harus mampu membangun sistem koordinasi mandiri untuk menjalankan seluruh prosesnya sebagai lembaga usaha. Peran Kepala Desa dalam pengelolaan BUMDes adalah untuk mendirikan, berpartisipasi dalam pengendalian program kerja yang diselenggarakan BUMDes dan mendorong terciptanya BUMDes sebagai lembaga yang mampu secara profesoinal mengelola seluruh proses usaha dan memastikan proses itu berjalan dengan baik.



Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014, pasal 1, ayat (2) tentang desa menjelaskan, bahwa pemerintah Desa ialah “penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Sedangkan penyelenggaraan ialah pemerintah Desa, yaitu kepala Desa atau yang disebut dengan Nama lain dan yang dibantu oleh perangkat Desa Dimana, dalam penyelenggaraan pemerintahan desa tersebut berdasarkan asas kepastian hukum, tertib penyelenggaraan pemerintahan, tertib kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, akuntabilitas, efektifitas, efisiensi, kearifan local, keberagaman, dan partisipatif. Menurut Moch Solekhan, sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah desa, maka pemerintah Desa memiliki Fungsi salah satunya: melaksanakan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan dan melaksanakan pembinaan perekonomian Desa. (chaintary, asih widi, 2018 :59-60)

Dengan adanya Undang-undang Nomor 6 tahun 2014, masyarakat berharap BUMDes mampu mengerjakan perekonomian Desa. Aset ekonomi yang ada didesa harus dikelola sepenuhnya oleh masyarakat melalui perogram BUMDes. Pengembangan berbasis ekonomi dipedesaan sudah sejak lama dijalankan pemerintah melalui berbagai cara dan program agar tercapai tujuan, naumun upaya tersebut belum juga membuahkan hasil yang sesuai dengan perkiraan. Banyak faktor yang menghambat peroses perogram tersebut antara lain salah satunya intervensi pemerintah terlalu besar, dan kurangnya dana yang diberikan pemerintah kepada Desa, akibatnya dapat menghambat kreativitas dan inovasi masyarakat Desa dalam mengelola dan menjalankan mesin ekonomi pedesaan.

Solekhan (2014:73), memperhatikan besarnya peranan BUMDes dalam memberikan alternative pada beberapa program pendampingan maupun hibah, maka perlu adanya konsep pengelolaan yang baik meliputi:

1. Pengelolaan BUMDes harus secara terbuka, dan dapat diketahui oleh masyarakat.
2. Pengelolaan BUMDes harus dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat desa dengan mengikuti kaidah dan peraturan yang berlaku.
3. Masyarakat desa terlibat secara aktif dan proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan.
4. Pengelolaan BUMDES harus memberikan hasil dan manfaat untuk warga masyarakat secara berkelanjutan.

Dengan melihat penjelasan di atas dan judul mengenai peran pemerintah Desa dalam pengelolaan BUMDes di Desa Kuta Padang Kecamatan Simeulue Cut Kabupaten Simeulue. Muncul suatu permasalahan mengenai peran pemerintah Desa menyangkut Pengelolaan BUMDes yang sedang dijalankan di Desa Kuta Padang.

Desa kuta padang salah satu Desa yang terdapat di kecamatan Simeulue Cut Kabupaten Simeulue dari 8 Desa yang terdapat di Kecamatan Simeulue Cut. Kecamatan Simeulue Cut adalah sebuah Kecamatan yang terdapat di Kabupaten Simeulue, Kecamatan ini merupakan hasil pemekaran dari Kecamatan Simeulue Tengah yang diresmikan pada tanggal 22 Oktober 2012. (Simeulue Cut, [simeulue.id.m.wikipedia.org](http://simeulue.id.m.wikipedia.org).)

Sedangkan Desa kuta padang sudah berdiri sejak jaman Belanda yang dulunya Desa Kuta Padang bergabung di Kecamatan Simeulue Tengah, Desa kuta padang terdiri dari 4 Dusun yaitu Dusun ingin jaya, simare mare, lahapor maju dan bano inda.

Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Kuta Padang, Pemerintah Desa telah mendirikan BUMDes pada tanggal 10 Agustus 2016. BUMDes yang sedang di jalankan saat ini di Desa Kuta Padang mempunyai nama usaha yaitu *samo tananami*, adapun jenis usahanya ada 5 jenis usaha yaitu :

Tabel 1. Jenis usaha BUMDes

NO	Jenis Usaha	Kegiatan Usaha	Pengelola
1.	Usaha peyewaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peyewaan Perontok padi</li> <li>• Peyewaan Teraktor</li> </ul>	Rosyenni Maida
2.	Usaha perdagangan	penjualan alat tulis kantor	Mulia Asdawani
3.	Simpan pinjam	Memberikan pinjaman minimum 500.00 dan maksimum 10.000.00 dengan bunga 2 persen.	Samsurles
4.	Usaha perternakan	Perternakan kerbau	Zulhelmi
5.	Usaha perekebunan	kebun kelapa	Tito Fariasah

*Sumber : diolah oleh peneliti*

Berdasarkan penelitian awal yang saya amati ada beberapa kendala dalam pengelolaan BUMDes di Desa Kuta Padang dikarenakan kurangnya Sumber daya manusia (SDM) dan kurangnya pengawasan dalam pengelolaan BUMDes. Seperti ;yang telah dijelaskan diatas Desa Kuta Padang memiliki 5 jenis usaha BUMDes,

dari ke-5 usaha BUMDes tersebut ada beberapa jenis usaha yang tidak berjalan dengan baik yaitu usaha penyewaan dan perternakan. Usaha penyewaan banyak mengalami kerusakan dan tidak diperbaiki sehingga tidak dapat di gunakan kembali sedangkan usaha perternakan yaitu perternakan kerbau tidak berjalan lagi di karenakan terkena waba penyakit sehingga menyebabkan kematian.

Alasan mengapa saya mengangkat judul ini karena saya ingin melihat bagaimana Peran Pemerintah Desa dalam pengelolaan BUMDes di Desa Kuta Padang dari pembentukan BUMDes hingga pembentukan pengurus BUMDes serta bagaimana Pemerintah Desa mengelolaa setiap jenis unit usaha BUMDes di Desa Kuta Padang.

## **1.2 Rumusan masalah**

Dari latar belakang di atas, maka dapat diambil beberapa permasalahan yang akan dibahas yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana peran pemerintahan Desa dalam pengelolaan BUMDes di Desa Kuta Padang Kecamatan Simeulue Cut Kabupaten Simeulue ?
2. Apa saja kendala yang dihadapi oleh pemerintahan Desa dalam Pengelolaan BUMDes di Desa Kuta Padang Kecamatan Simeulue Cut Kabupaten Simeulue ?

## **1.3 Tujuan penelitian**

Tujuan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui peran pemerintah Desa dalam Pengelolaan BUMDes di Desa Kuta Padang Kecamatan Simeulue Cut Kabupaten Simeulue.

2. Untuk mengetahui apa saja kendala yang dihadapi oleh pemerintahan Desa dalam Pengelolaan BUMDes di Desa Kuta Padang Kecamatan Simeulue Kabupaten Simeulue

#### **1.4 Manfaat penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Untuk masyarakat umum
  - a. Penelitian memberikan tambahan pengetahuan tentang peran pemerintah Desa dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Kuta Padang Kecamatan Simeulue Kabupaten Simeulue.
  - b. Penelitian dapat memberikan gambaran kepada masyarakat bahwa BUMDes merupakan pendapatan Desa yang menjadi sumber pendapatan Desa dimana pada akhirnya akan di nikmati setiap masyarakat sehingga masyarakat mengikuti program BUMDes di desa.
  - c. Bagi Kantor Desa Kuta Padang, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi Pemerintahan Desa, untuk mengambil kebijakan-kebijakan dalam rangka menjalankan usaha BUMDes, meningkatkan pendapatan Desa dari jenis-jenis BUMDes yang dikelola di Desa tersebut.
  - d. Diharapkan menjadi bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan dan kebijakan dimasa yang akan datang.



2. Bagi pihak lain

Penelitian yang telah dilakukan ini semoga dapat digunakan sebagai bahan acuan untuk penelitian selanjutnya atau penulisan karya ilmiah dengan bahasa yang sama.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Pengertian peran

Peran adalah suatu rangkaian perilaku tertentu yang ditimbulkan dari jabatan tersebut. Setiap manusia dalam kehidupannya memiliki peran dan fungsi dalam menjalankan kehidupan sosialnya. Dalam melaksanakan perannya setiap memiliki cara atau sikap yang berbeda, hal ini dipengaruhi oleh latar belakang sosial

Pengertian peran menurut Soerjono Soekanto, yaitu peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan sesuatu peranan. Peran-peran yang biasa disebut juga dengan peranan (*role*) memiliki beberapa arti:

1. Aspek dinamis dari kedudukan.
2. Perilaku aktual dan pemegang kedudukan.
3. Bagian dan aktivitas yang dimainkan oleh seseorang peran sedikitnya mencakup 3 hal yaitu peran meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat, peran adalah suatu konsep mengenai apa yang dapat dilakukan oleh

individu dalam masyarakat dan peran dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat. (imanuel , 2020 : 1185)

Menurut soejono dan sulistyowati 2017 : 211 Peran mencakup norma-norma yang diungkapkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat.

1. Peran merupakan suatu konsep tentang yang dilakukan individu itu dalam masyarakat sebagai organisasi.
2. Peran dikatakan sebagai perilaku individu yang penting sebagai struktur sosial masyarakat.

Menurut Sulistywati (2017;211) perihal peranan yang melekat pada individu-individu-individu dalam masyarakat yang penting yang penting sebagai berikut:

1. Peranan tertentu harus dilaksanakan apabila struktur masyarakat hendak dipertahankan keberlangsungan.
2. Peranan tersebut diletakan pada individu yang masyarakat dianggap mampu melaksankannya, dan harus terlebih dahulu berlatih dan mempunyai keinginan untuk melaksanakannya.
3. Dalam masyarakat terkadang ada individu-individu yang tidak melaksanakan perannya, peranan sebagai yang diharapkan oleh masyarakat karena pelaksanaannya memerlukan pengorbanan arti kepentingan pribadi lebih banyak.
4. Apabila semua orang mampu dan sanggup melaksanakan perannya. Belum tentu masyarakat akan dapat memberikan peluang yang seimbang.
5. Terlihat masyarakat terpaksa membatasi peluang-peluang tersebut.

Peran diatur oleh norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Peranan dapat mencakup 3 hal yaitu :

1. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat.
2. Peranan merupakan suatu konsep tentang apa yang dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
3. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.( *Peranan.id,m.wikipedia.org*, akses 12 Desember 2020)

Menurut Stephen P Robbins (2003 :305) peran ialah seperangkat pola perilaku yang diharapkan dikaitkan pada seseorang yang menduduki posisi tertentu dalam unit sosial.

Seperanglat pola perilaku yang diharapkan dikaitkan pada seseorang pada yang menduduki posisi tertentu dalam unit sosial. Selain itu peran juga dikaitkan sebagai pekerjaan seseorang atau individu, mengandung harapan tertentu tidak memperdulikan siapa yang menduduki suatu posisi tersebut. Ia menjalankan peranya sendiri dengan tugas dan fungsinya Bryant dan White. (Marselida 2020:10)

Peran merupakan suatu rangkaian yang ditimbulkan karena suatu jabatan karena adanya suatu kantor yang dikenal, dalam bahasa organisasi peranan diperoleh dari jabatan yang memiliki tanggung jawab dalam suatu pekerjaan (Mifta Thoha 2008:10). Sedangkan peran sebagai tindakan yang dilakukan seseorang atau

kelompok dalam menangani suatu peristiwa merupakan suatu tindakan laku di masyarakat (Poerwadarminta 2002:751).

Menurut Poerwadarminta (2002:751) peran merupakan tindakan yang dilakukan seseorang atau sekelompok dalam dalam suatu peristiwa, berdasarkan tersebut tindakan seseorang atau sekelompok itu dalam menangani suatu peristiwa merupakan suatu tingka laku di masyarakat.

Dari teori peran yang peneliti jelaskan di atas peneliti pengangkat teori peran dari Kemudian John M. Ivancevich, Robert dan Michael T. Matteson, berpendapat peran meliputi :

1. peran yang diharapkan (*Expectad Role*) yaitu setiap jabatan dalam struktur kelompok memiliki peran yang menentukan perilaku yang di harapkan dari si pemegang jabatan.

Dalam poin ini peneliti melihat bagaimana pemerintah Desa berperan Dalam pengelolaan serta pelaksanaan program- program BUMDes,

2. peran yang di persepsikan (*perceived Role*) yaitu seperangkat perilaku yang dalam keyakinan seseorang harus iya lakukan karena posisinya.

Dalam poin ini peneliti melihat bagaimana peranan yang dilakukan pemerintah Desa apakah sesuai dengan posisinya.

3. peran yang dijalankan (*role played*) yaitu perilaku yang benar-benar iya jalankan oleh orang tersebut.

Dalam poin ini peneliti melihat peran yang benar-benar di jalankan oleh Pemerintah Desa dalam pembentukan dan pengelolaan BUMDes.

## 2.2 Pengertian Desa

Desa, baik Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. (Shuaida, 2016 :18)

Desa sendiri berasal dari bahasa idiah yakni *suwadesi* yang artinya tempat asal, tempat negara asal, atau tana leluhur yang menumbukan pada suatu kehidupan, dengan suatu norma, serta memiliki batasan yang jelas. Karakteristik masyarakat desa pada beberapa keputusan luar masyarakat kota merupakan kajian yang saling kait-mengait dan mereka mengistilakan rural *community* untuk masyarakat kota. Perbedaan berdasarkan pada letak tinggal geografis dan kebiasaan serta karakteristik yang keuanya memandang beda. (soekanto,sulitiawati : 2017) mengemukakan bahwa konsep *commonity* merujuk pada konsep lokalitas atau masyarakat yang memiliki wilayah dan adat setempat.

## 2.3 Pemerintah Desa

### 2.3.1 Pengertian Pemerintahan Desa

Pemerintah Desa terdiri dari Kepala Desa dan perangkat Desa pemerintah Desa adalah center authority (kewenangan pusat) yang fungsi sebagai administrator pemerintahan, administrator Pembinaan rakyat, dan admisitrator pembangunan, dan mempunyai peranan yang sangat



menentukan terhadap keberhasilan pembangunan Desa. Sebuah desa dipimpin oleh Kepala Desa dipilih secara langsung oleh masyarakat desa melalui sebuah pemilihan kepala Desa (pilkades).

Berdasarkan undang-undang No 6 tahun 2014 Desa, seorang kepala desa menjabat selama 6 tahun untuk satu kali masa jabatan dan dapat dipilih kembali maksimal tiga kali baik secara berturut-turut atau tidak. Kepala desa dalam kedudukannya sebagai kepala pembangunan masyarakat desa bertanggung jawab atas pelaksanaan pembangunan di desanya.

Kepemimpinan Kepala Desa pada dasarnya bagaimana Kepala Desa dapat mengoordinasi seluruh kepentingan masyarakat desa setiap pengambilan keputusan. Kepala Desa Akan berhasil apabila kepemimpinannya memerhatikan suara rakyat yang dipimpin secara demokratis yaitu mencerminkan keterbukaan, bertanggung jawab, dalam mengambil keputusan yang didasarkan kepada hasil kesepakatan untuk kepentingan masyarakat.

### **2.3.2. Landasan Hukum Pemerintah Desa.**

Berikut Landasan hukum pemerintah Desa yaitu:

1. Undang-Undang 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
2. Peraturan pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Desa.

3. Peraturan pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang perubahan atas peraturan pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Penyelenggaraan pemerintah Desa merupakan organisasi pemerintah Desa yang terdiri dari:

1. Unsur pimpinan, yaitu kepala desa
2. Unsur pembantu kepala Desa, yang terdiri dari :
  - a. Sekretaris desa yaitu unsur staf atau pelayanan
  - b. Unsur pelaksana teknis yaitu unsur pembantu kepala desa yang melaksanakan urusan teknis, yaitu dilapangan seperti urusan pengairan, keagamaan dan lain-lain.
  - c. Unsur kewilayaan. Yaitu pembantu kepala desa diwilaya kerjaan seperti kepala dusun.

### **2.3.3 Susunan Organisasi Pemerintahan Desa**

Susunan organisasi pemerintah Desa ditetapkan oleh kepala desa setelah mendapat persetujuan badan permusyawaratan rakyat (BPD). Susunan organisasi pemerintah desa tersebut dilaporkan oleh kepala desa kepada bupati dengan tembusan camat. Peraturan lanjut mengenai hal ini di tetapkan dalam peraturan daerah kabupaten, yang mana peraturan tersebut membuat Materi antara lain mengenai susunan organisasi, kedudukan, tugas dan tenaga kerja.

### **2.3.4 Wewenang Kepala Desa**

Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Dalam melaksanakan tugasnya, kepala desa mempunyai wewenang yaitu:

1. Memimpin penyelenggaraan pemerintah Desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD;
2. Mengajukan perencanaan Desa;
3. Menetapkan peraturan desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD;
4. Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai APB Desa untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD;
5. Membina kehidupan
6. Masyarakat Desa;
7. Membina perekonomian desa;
8. Mengoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif.
9. Mewakili desanya didalam dan diluar pengadilan dan dapat menunjukan kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undang;Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undang.

### **2.3.5 Kewajiban Kepala Desa.**

Dalam melaksanakan tugasnya dan wewenang kepala desa mempunyai kewajiban, yaitu:

1. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan NKRI;
2. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
3. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat;
4. Melaksanakan kehidupan demokrasi;
5. Melaksanakan tertip tata pemerintahan Desa yang bersih dan bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme.
6. Menjalin hubungan kerja sama dengan seluruh mitra kerja pemerintahan desa;
7. Menaati dan menegakan seluruh peraturan perundang-undangan;
8. Menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik.
9. Melaksanakan dan mempertanggung jawabkan pengelolaan keuangan desa;
10. Melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan desa;
11. Mendamaikan perselisihan masyarakat di desa;
12. Mengembangkan pendapatan masyarakat desa;
13. Membina, mengayomi dan melestarikan nilai-nilai sosial budaya dan istiadat masyarakat;
14. Memerdayakan masyarakat dan kelembagaan di desa dan
15. Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup.

### **2.3.6 Pertanggung Jawaban Kepala Desa**

Kepala Desa bertanggung jawab kepada rakyat melalui BPD dan menyampaikan laporan mengenai laporan tugasnya kepada kepala bupati. Pertanggung jawaban kepala desa disampaikan kepada BPD sekali dalam setahun pada setiap tahun anggaran dan apabila pertanggung jawaban kepala Desa ditolak oleh BPD harus dilengkapi atau disempurnakan dan apabila suda dilengkapi dan disempurnakan tetap ditolak untuk kedua kalinya juga, maka BPD mengusulkan pemeritahuan kepala desa kepada Bupati. Mekanisme ini dilakukan agar sandi tanggung jawab pelaksanaan pemerintah yang dilakukan kepala desa kepada rakyat melalui BPD dapat dilihat sebagai perwujudan dari kedaulatan rakyat. (Rumiani, 2020 : 33-38)

## **2.4 Kajian Pengelolaan BUMDes**

Kajian pengelolaan BUMDes yaitu sebagai berikut :

### **2.4.1 Pengetian pengelolaan**

Menurut prajudi pengelolaan adalah pengendalian dan pemnfaatan semua faktor sumber daya yang menurut suatu perencanaan diperlukan untuk menyelesaikan suatu tujuan kerja tertentu. (Rahayu, 2018 :9) Sedangkan menurut Moekijed menyatakan pengelolaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, petunjuk, pelaksana, pengendalian dan pengawasan. Meskipun dua ahli diatas memberikan pengerian yang berbeda, naum pada prinsipnya memiliki maksud dan tujuan yang sama.

### **2.4.2 Pengertian BUMDes**



BUMDes adalah Badan Usaha Milik Desa yang didirikan atas kebutuhan kebutuhan dan potensi Desa Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintahan desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. (Agusliansyah, 2020 : 1789)

Peraturan mengenai pendirian BUMDes diatur dalam beberapa peraturan perundang-undang yaitu sebagai berikut:

1. undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pasal 87 sampai pasal 90;
2. peraturan pemerintah Nomor 43 Tahun tentang Desa pasal 132 sampai 142;
3. peraturan menteri Desa, pembangunan Daerah tertinggal dan transmigrasi republic Indonesia Nomor 4 tahun 2015 Tentang pendirian, pengurus, pengelolaan dan pembubaran BUMDes.
4. Peraturan menteri Desa, pembangunan daerah tertinggal, dan Transmigrasi Reublik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang pedoman tata tertip dan mekanisme pengembalian keputusan Musyawarah Desa Pasal 88 dan pasal 89.

Dasar pembentukan BUMDes di atur dalam pasal 108 undang-undang Nomor 22 tahun 1999 yang berbunyi “Desa dapat memiliki badan usaha sesuai dengan peraturan perundang-undang”. Kemudian pemerintah

mengamatkan lagi dalam pasal 213 undang-undang Nomor 32 tahun 2004 yang berbunyi:

1. Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi Desa;
2. Badan Usaha Milik Desa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada peraturan perundang-undang;
3. Badan Usaha Milik Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pinjaman sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya dalam undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, pemerintah bahkan membuat bab khusus mengenai BUMDes yaitu pada BAB X Badan Usaha Milik Desa dalam pasal 87 yang berbunyi:

1. Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang disebut dengan BUMDes;
2. BUMDes dikelola dengan semangat secara kekeluargaan dan bergotong royong
3. BUMDes dapat menjalankan usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang.

### **2.4.3 Pendirian dan pengelolaan BUMDes**

Pendirian BUMDes didasarkan atas prakarsa Desa yang mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Inisiatif pemerintah desa dan masyarakat;
2. Potensi usaha ekonomi desa;

3. Sumber daya alam desa;
4. Sumber daya manusia yang mampu mengelolah BUMDes ; dan
5. Menyertakan modal dari pemerintahan Desa dalam bentuk pembinaan dan kekayaan desa diserahkan untuk dikelolah sebagai bagian dari usaha BUMDes.

Organisasi pengelolaan BUMDes hendaknya dilakukan terpisah dari organisasi pemerintah Desa. Susunan pengurus organisasi pengelolaan BUMDes terdiri dari sebagai berikut:

1. Penasihat;
2. Pelaksanaan operasional;
3. Pengawas.

Prinsip-prinsip pengelolaan BUMDes penting untuk dikolaborasi atau diuraikan agar dipahami dengan cara yang sama oleh Pemerintah Desa, anggota, BPD, pemkab, dan masyarakat. Terdapat 6 prinsip dalam pengelolaan BUMDes yaitu:

1. Kooperatif adalah semua komponen untuk memajukan usaha;
2. Emansipasi adalah komponen yang terlibat di dalam BUMDes harus diperlakukan sama tanpa memandang golongan, suku atau agama;
3. Transparan adalah aktifitas yang mempengaruhi terhadap kepentingan masyarakat umum harus dapat diketahui terlibat didalam harus mampu melakukan kerjasama yang baik demi kelangsungan dan pengembangan usaha.

4. Akuntabel adalah seluruh kegiatan usaha harus dapat dipertanggung jawabkan secara teknik maupun administrative.
5. Substansi adalah kegiatan usaha harus dapat dikembangkan dan dilestarikan oleh masyarakat dalam BUMDes.

#### 2.4.4 Tujuan BUMDes

Pendirian BUMDes dimaksud sebagai upaya untuk menampung seluruh kegiatan dibidang ekonomi dan pelayanan yang dikelola Desa dan/atau kerjasama antar Desa. Di dalam pasal 3 permendes pdtt Nomor 4 Tahun 2015 BUMDes didirikan dengan tujuan:

1. Meningkatkan perekonomian Desa;
2. Menoptimalkan aset Desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan desa;
3. Meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi desa;
4. Mengembangkan rencana kerja usaha antar Desa dan/atau pihak ketiga;
5. Membuka lapangan pekerjaan;
6. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat ;
7. Meningkatkan pendapatan masyarakat Desa dan pendapatan asli Desa.

(Agusliansyah, 2020 : 39-43)

#### 2.5 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini yaitu Penelitian dari Nofiratullah dengan judul Eksistensi BUMDes Dalam meningkatkan perekonomian masyarakat Desa soki Kecamatan Belo Kabupaten Bima peneliti melakukan penelitian menggunakan metode penelitian kualitatif dengan hasil penelitian yaitu Eksistensi BUMDes dalam meningkatkan perokonomian masyarakat di desa Soki Kecamatan Belo

Kabupaten Bima terus mengalami peningkatan segi pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.

penelitian dari Andriani Sari dengan judul penelitian yaitu Pengaruh BUMDes terhadap pengembangan ekonomi Desa Di kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai tahun 2017. Yang menggunakan metode penelitian Kualitatif , hasil penelitiannya yaitu Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai hitung sebelum adanya BUMDes dan sesudah adanya BUMDes adalah -6,925 dengan probabilitas (sig) 0.000. karena probabilitas (sig)  $0,000 < 0,05$  maka  $H_0$  ditolak artinya terdapat pengaruh sebelum dan sesudah dengan adanya BUMDes berdasarkan pengolahan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa dengan adanya BUMDes sangat berpengaruh terhadap pembangunan ekonomi desa.

penelitian dari Ahmat NurIhsan dengan judul analisis pengelolaan BUMDes Gerbang Lentara sebagai Pengerakan Desa wisata lerep tahun 2018. Dengan menggunakan metode penelitian Kualitatif. Hasil penelitian yaitu Menunjukkan bahwa walaupun masi baru BUMDes gerbang Lentara merupakan salah satu BUMDes yang pengelolaanya sangat baik sehingga menjadi rujukan Desa lain untuk berkunjung dan study banding hanya saja BUMDes di Desa lerep masi sulit mencari karyawan karna masi sulitnya BUMDes memberikan gaji.

Penelitian dari Ulul Hidayah, Sri Mulatsih dan Yeti Lis Purnama Dewi dengan judul Evaluasi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) : studi kasus BUMDes Harapan Jaya Desa pengelaran, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor. Menggunakan metode penelitian kualitatif Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pembentukan BUMDes harapan jaya telah sesuai dengan aturan yang berlaku. Meski sebelumnya di awal



pembentukan struktur kepengurusan tidak sesuai dengan aturan, namun telah diperbaiki setelah satu tahun berjalan. Pada pelaksanaan BUMDes harapan jaya tahun 2015-2016 mengalami mengalami kebangkerutan dikarenakan tidak adanya komitmen pengurus. Kemudian ditahun 2017 pelaksanaan BUMDes harapan jaya merencanaksn unit usaha hingga di tahun 2018 hanya 4 unit usaha yang terbentuk. Ke 4 unit usaha tersebut belum mampu memerdayakan masyarakat dan mengurangi tingkat pengangguran di desa.

Berdasarkan penjelasan diatas, yakni mengenai penelitian-penelitian terdahulu yang terdapat sangkut-pautnya dengan penelitian ini, penelitian yang penulis lakukan memiliki fokus yang berbeda walau penelitian dilakukan sama yakni program BUMDes.

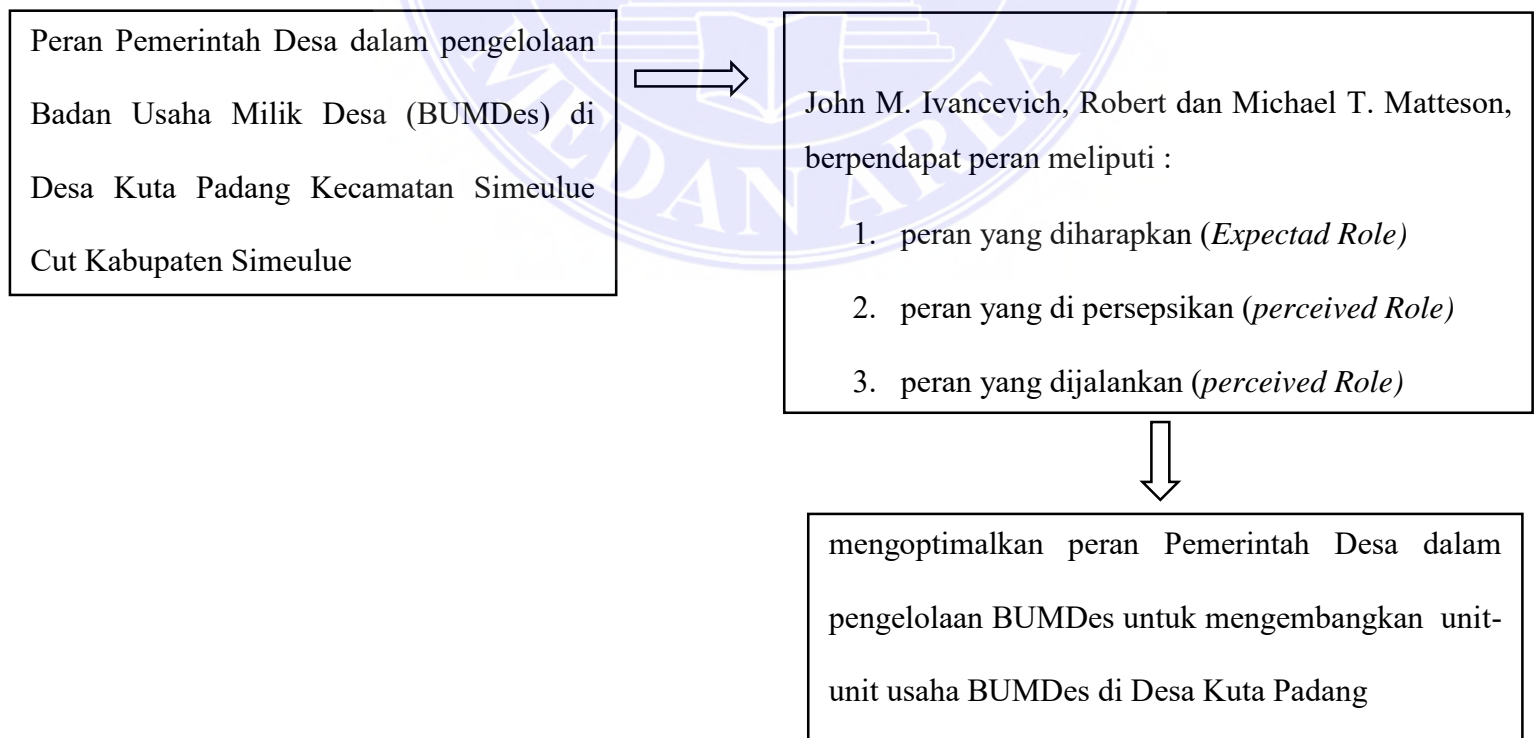
Penelitian dari Kade Darwita dan Dewa Nyoman Redana berjudul Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam pemerdayaan masyarakat dan penggulangan pengangguran di Desa Tajakula Kecamatan Tajakula Kabupaten Bulelang. Metode penelitian bgunakan kualitatif pembahasan bahwa peran perencanaan pembangunan desa tajakulah dalam memerdayakan BUMDes pertama bertujuan untuk menurangi pengangguran kedua untuk pengembangan potensi masyarakat. secara umum dapat dikatakan suda berjalan dengan baik.

Penelitian sebelumnya membahas mengenai eksistensi BUMDes Dalam meningkatkan perekonomian masyarakat Desa, Pengaruh DUMDes terhadap pengembangan ekonomi Desa, analisis pengelolaan BUMDes , bagaimana pelaksanaan BUMDes dan Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam pemerdayaan masyarakat dan penggulangan pengangguran di Desa. sedangkan penelitian ini fokus

terhadap peran pemerintah Desa dalam pengelolaan BUMDes dan kendala apa saja yang di hadapi pemerintah Desa dalam pengelolaan BUMDes.

## 2.6 Kerangka Berpikir

Kerangka beripikir dalam penelitian ini menggambarkan alur penelitian mengenai fokus penelitian yang akan dilaksanakan yaitu peran pemerintah Desa dalam pengelolaan Badan Usah Milik Desa (BUMDes) di Desa Kuta Padang Kecamatan Simeulue Cut Kabupaten Simeulue. Berdasarkan observasi awal yang dilakukan peneliti bahwa ada beberapa kendala dalam pengelolaan BUMDes di Desa Kuta Padang dikarenakan kurangnya Sumber daya manusia dan kurangnya pengawasan dalam pengelolaan BUMDes. Seperti yang telah dijelaskan di latar belakang masalah bahwa Desa Kuta Padang memiliki 5 jenis usaha BUMDes, dari ke-5 usaha BUMDes tersebut ada beberapa jenis usaha yang tidak berjalan dengan baik yaitu usaha penyewaan dan perternakan.



Gambar 2. Kerangka berpikir.

Dalam penelitian ini saya menggunakan teori dari John M. Ivancevich, Robert dan Mizchael T. Matteson, menurut saya teori ini mampu memecahkan Rumusan masalah dalam penelitian ini.

### BAB III METODE PENELITIAN

#### 3.1. Jenis Penelitian

Pada penelitian ini penulis menggunakan Metode penelitian kualitatif yang bersifat Deskriptif. Penelitian kualitatif sebagai rangkaian proses penelitian yang dilakukan untuk menghasilkan data Deskriptif yang berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati dari fenomena yang terjadi. Penelitian Deskriptif menekankan pada data berupa kata-kata, dokumen-dokumen dan gambar. Jadi, penelitian kualitatif deskriptif yaitu penelitian dengan mengumpulkan data lapangan yang kemudian dibahas dan dianalisis dengan mengacu pada landasan teoritis. dengan dasar tersebut, maka penelitian ini dapat diharapkan mampu menggambarkan tentang peran pemerintah desa dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Di Desa Kuta Padang Kecamatan Simeulue Cut Kabupaten Simeulue.

### 3.2. Jenis Dan Sumber Data

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini bersumber dari dua jenis data yaitu:

#### 1. Data Primer

Merupakan sumber data yang di ambil dilapangan. Data primer dalam penelitian ini, dikumpul melalui penelitian langsung dengan turun langsung kelokasi penelitian untuk mencari fakta-fakta dan data-data yang berkaitan dengan masalah-masalah yang sedang diteliti. Adapun data yang diperoleh yakni dari wawancara dan observasi yang dilakukan terhadap pegawai yang menjadi informan penelitian di kantor Desa Kuta Padang untuk mendapat data yang diperlukan peneliti.

#### 2. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari studi kepustakaan atau tulisan ilmiah, maupun teknik dokumentasi yang dibutuhkan untuk mendukung hasil penelitian. Adapun yang menjadi data sekunder dalam penelitian ini seperti dokumen-dokumen, buku-buku yang mengenai pengelolaan BUMDes serta jurnal ilmiah.

Tabel 2. Informasi penelitian

<b>Nama</b>	<b>Jabatan</b>	<b>Jumlah Informan</b>
M. DIN	Kepala Desa Kuta Padang	1 ( satu) orang
Zainul	Ketua BPD Desa kuta padang	1 (satu) orang

Sulmansyah S.pd	Direktur BUMDes	1 (satu) orang
Ari peranata	Sekretaris BUMDes	1 (satu) orang
Bahnil. Ali	Bendahara BUMDes	1 (satu) orang
-	Masyarakat	2 (dua) orang

*Sumber: diolah oleh peneliti*

### 3.3 Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlokasi di Desa Kuta Padang Kecamatan Simeulue Cut Kabupaten Simeulue Provinsi Aceh.

### 3.4 Teknik Pengumpulan Data

Ada 3 teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti dalam penelitian, diantaranya adalah wawancara, observasi dan dokumentasi.

#### 1. Pengamatan (observasi)

Teknik ini dilakukan dengan cara mengamati segala hal yang diteliti bertujuan untuk mempermudah segala hal yang diteliti serta untuk melancarkan penelitian yang dilaksanakan. Pengamatan yang dilakuakn langsung terhadap objek untuk mendapatkan gambaran yang tepat mengenai objek penelitian, dalam penelitian ini, penelitian mengadakan pengamatan penelitian kepada pegawai di kantor Desa Kuta Padang, penelitian mengamati bagaimana pengelolaan BUMDes.

#### 2. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dimana pewawancara (peneliti atau yang diberi tugas melakukan pengumpulan data) dalam



pengumpulan data mengajukan suatu pertanyaan kepada yang diwawancarai. Total informan yang peneliti wawancarai berjumlah 7 (tujuh) informan. Informan adalah orang yang diperkirakan menguasai dan memahami data, informasi, atau pun fakta objek penelitian.

Dalam penelitian ini, peneliti mengambil informan dari :

a. Informan kunci

Informan kunci dalam penelitian ini yaitu Kepala Desa Kuta Padang yang juga menjabat sebagai Komisari BUMDes yaitu Bapak M.DIN. yang menurut peneliti dapat menjawab pertanyaan yang peneliti berikan. Wawancara akan peneliti lakukan terkait tentang peran Pemerintah Desa dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) tentang jenis usaha dan kendala yang dihadapi dalam pengelolaan BUMDes dan tidak lupa pulak penulis tanyakan faktor pendukung dan penghambat dalam pengelolaan BUMDes di Desa Kuta Padang.

b. Informan Utama

Informan utama dalam penelitian ini yaitu BPD desa sebagai Pengawas BUMDes diketuai oleh Bapak Zainul, Direktur BUMDes Bapak Sulmasyah S,pd, Skretaris BUMDes Bapak Ari Peratama dan Bendahara BUMDes Bapak Bahnil Ali yang menurut peneliti dapat menjawab pertanyaan yang peneliti berikan. Wawancara akan peneliti lakukan terkait tentang Peran Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) tentang jenis usaha dan kendala yang di dihadapi dalam pengelolaan

BUMDes dan tidak lupa pulak penulis tanyakan faktor pendukung dan penghambat dalam pengelolaan BUMDes di Desa Kuta Padang.

c. Informan tambahan

Informan tambahan dalam penelitian ini yaitu masyarakat, peneliti mengambil 2 informan tambahan dari masyarakat yaitu Ibu Nur Bidah yang merupakan masyarakat Desa Kuta Padang juga ikut berpartisipasi dalam BUMDe dan Ridalisalam merupakan mahasiswa di Desa Kuta Padang. yang menurut peneliti dapat menjawab pertanyaan yang peneliti berikan. Wawancara akan peneliti lakukan terkait tentang peran pemerintah Desa dalam Pengelolaan BUMDes tentang jenis usaha yang sedang di kelolah. Tidak lupa pula penulis tanyakan faktor pendukung dan penghambat dalam pengelolaan BUMDes Di desa Kuta Padang.

3. Dokumentasi

Menurut Hamidi dokumentasi adalah teknik pengumpulan data berupa traskrip atau berita penting yang bersumber dari lembaga atau pihak independen. Jadi dokumentasi dapat diartikan iyalah teknik pengumpulan data melalui peninggalan tertulis, seperti arsip-arsip, termaksud juga buku-buku tentang pendapat dan teori, hukum-hukum, yang berhubungan dengan masalah peneliti. Data ini dengan menggunakan catatan-cataan yang ada dilokasi penelitian seperti berosur, dokumen-dokumen, serta sumber-sumber lain yang relavan dengan objek penelitian. Peneliti juga mengambil gambar yang diperlukan dilapangan sebagai dokumen penunjang penelitian.

### 3.5 Instrumen penelitian

Instrumen penelitian yang penulis gunakan antara lain:

1. Lembaran observasi

adapun fungsinya lembaran observasi pada penelitian ini adalah untuk mencatat peristiwa, situasi, kondisi dan hal-hal lainnya yang mendukung penelitian.

2. Lembaran wawancara

adapun fungsi lembaran wawancara pada penelitian ini untuk mendapatkan informasi dan menjadi pedoman dalam pengumpulan data terhadap responden. Lembaran wawancara berisi pertanyaan-pertanyaan terbuka seperti yang sudah ditentukan sebelumnya agar mempermudah penulis dalam memperoleh informasi sebanyak mungkin.

3. Pedoman dokumentasi

adapun fungsi pedoman dokumentasi adalah untuk memperoleh informasi dari subjek yang telah dicatat sebelumnya. Hal yang dimaksud adalah berupa catatan tertulis, dokumentasi, foto, dan lain sebagainya.

### 3.6 Teknik Analisa Data

Penulis menggunakan teknik analisis data kualitatif bersifat induktif, yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh dari responden/objek penelitian, selanjutnya diinterpretasikan secara deskriptif kualitatif untuk mengambil kesimpulan. Aktifitas yang penulis lakukan dalam analisis data antara lain: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

### 1. Reduksi Data

Menurut sugiono (2010:338) reduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu. Dengan demikian data penelitian yang diperoleh akan memberikan gambaran keadaan yang lebih factual.

### 2. Pengajian Data

Penyajian data merupakan langkah setelah reduksi data, data didisplay atau disajikan. Dalam penelitian kualitatif penyajian data bias dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart, dan sejenisnya (sugiono, 2010: 34). Penyajian data ini merupakan kumpulan data dari informasi untuk proses penarikan kesimpulan dengan memahami kajian data penulis Akan mengetahui apa yang sedang terjadi dan seharusnya dilakukan untuk menganalisis dan mengambil tindakan.

### 3. Penarikan kesimpulan

Penarikan kesimpulan dalam penelitian kualitatif diharapkan menjadi temuan baru yang belum ada sebelumnya. Dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih gelap menjadi jelas setelah di teliti, dapat berupa hubungan kausal atau interaksi, hipotesis, atau teori.

Seperti yang dijelaskan oleh miles dan huberman (1992:20) dengan model interaksi sebagai berikut: fenomena utama yang berkaitan dengan penelitian ini adalah aspek-aspek yang berkaitan dengan pengelolaan BUMDes terutama berkaitan dengan aspek pembinaan dan pengembangan. Termaksud factor pendukung serta factor yang mempengaruhi.

### 3.7 Keabsahan Data

Pengujian keabsahan data pada penelitian ini di lakukan triangulasi. Menurut wiliam wiersma (1986) pada buku sugiyono (2010:372) triangulasi dalam pegujian kredibilitas diartikan sebagai pengecekan data dan berbagai sumber dengan berbagi cara dan berbagai waktu.

Dalam penelitian ini teknik triangulasi yang di gunakan adalah:

1. Triagulasi sumber, untuk menguji kredibilitas dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber.
2. Triagulasi metode, untuk menguji kredibilitasi dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan yang berbeda.

Dengan mengunkan dua teknik tersebut akan membuat data yang diperoleh memiliki jaminan kepercayaan data dan menghindari subjektifitas dari peneliti, turut pula melakukan corss check data dengan sumber dan teknik yang berbeda.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 KESIMPULAN**

Berdasarkan permasalahan yang dari rumusan masalah , dapat ditarik kesimpulan berdasarkan teori yang peneliti lakukan sebagai berikut:

1. Peran yang diharapkan (*Expected Role*)

Berdasarkan dengan poin ini pemerintah Desa dalam pengelolaan BUMDes Desa Kuta Padang masi minim, peran pemerintah Desa dalam pengelolaan BUMDes baru dilakukan oleh Bapak Sekretris Desa, dan untuk aparat Desa lainnya belum ada upaya yang dilakukan.

2. Peran yang dipersepsikan (*Perceived Role*)

Menurut peneliti Pemerintah Desa harus menjalankan tugasnya sesuai dengan jabatannya dan posisinya yang memperhatikan masyarakat kecil, pemerintah Desa berperan penting dalam pengelolaan BUMDes dari mendirikan BUMDes, menciptakan unit-unit usaha dengan melihat potensi Desa dan membentuk pengurus BUMDes dengan bermusyawara Akan tetapi Pemerintah Desa Kuta Padang tidak menjalankan tugas atau posisinya sebagai Pemerinta Desa dalam Pengelolaan BUMDes sebagai mestinya.

3. Peran yang dijalankan (*Role Playet*)

Dalam poin ini Pemerintah Desa Kuta Padang dan pengelolaan BUMDes belum berperan secara keseluruha. Pemerintah Desa hanya berperan dalam pendirian dan perencanaan unit usaha dan untuk

penasehat, pengawasan serta pelaksana operasional masi kurang dalam melaksanakan pengelolaan BUMDes,

## 5.2 SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah disimpulkan maka saran yang dapat penulis sampaikan yaitu sebagai berikut:

1. Untuk kemajuan BUMDes Desa Kuta Padang Pemerintah Desa harus memberikan perhatian Khusus untuk mengawasi kegiatan BUMDes. Dalam berbagai kegiatan BUMDes seharusnya masyarakat dilibatkan, masyarakat tidak dijadikan objek program saja akan tetapi ikut dalam mengelolaa BUMDes.
2. Diharapkan pemerintah Desa Kuta Padang kedepanya dapat mengelolah BUMDes lebih baik dari sebelumnya dan mengutamakan kepentingan masyarakat Desa Kuta Padang

## DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Nur Ihsan (2018), *Analisi Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Gerbang Lantara Sebagai Penggerak Desa Wisata Lerep. . . Dari Situs Ejournal3.Undip.Ac.Id.*
- Agusliansyah, K. (2020). Peran Kepala Desa Dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Di Desa Jemparing Long Iis Kabupaten Paser. *Ejournal.Ip.Fisip/Unmul.Ac.Id.*
- Chaintary, asih widi. (2018). Peran Pemerintah Desa Dalam Mengelolah Badan Usahan Milik Desa (BUMDes). *jisip :jurnal ilmu sosial dan ilmu politik.*
- Departemen Pendidikan Nasional Pusat kajian dinamika system pembangunan (PDKSOP) 2017 di sebarluakan oleh pimpinan pusat relawan pemerdayaan desa nasantra (PP-RPDN). *Panduan pendirian dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), jakarta selatan.*
- Hidaya,mulati,p.(2019). *Evaluasi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) studi kasusu BUMDes harapan Jaya Desa pengelaran, kecamatan ciomas, kabupaten Bogor.*
- Immanuel , f. (2020). Peran Kepala Desa Dalam Pengembangan Di Desa Budaya Sungai Bawang Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kurta Karta Negara . *Ejurnal.ip.fisip-unmul.ac.id.*
- Mifta, d Toha. (2007) *kepemimpinan dalam Manajemen. Jakarta: PT Raja Grafindo.*
- Nofiratullah,*Eksistensi badan usaha milik desa (BUMDes) dalam meningkatkan prekonomian masyarakat Desa Soki Kecamatan Belo Kabupaten Bima, Skripsi.*
- powerdamirminta, d W.J.S (2002). *Manajemen Tenaga Kerja Indonesia: pendekatan Administrasi dan operasional. jakarta: Bumi aksara.*
- Rahayu, g. (2018). *Pengelolaan Pajak Restoran Study Badan Pengelolaan Keuangan Kota Banda Aceh. Banda aceh.*
- Ratna sikin rambe, nova. (2018). Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) memerdayakan masyarakat di Desa bangai Kecamatan torgama Kabupaten batu selatan,.
- Rumiani. (2020). *peran pemerintah Desa dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) guna meningkatkan kesehjateraan masyarakat menurut perspektif ekonomi islam (study pada BUMDes bangun Jeman Desa Margodadi Kec, Jati Agung Kab.Lapangan Selatanp0 .*
- Ronnins, Stephen, d P. (2003). *Perilaku organisasi.*

Reza syaputra, *peran dinas kesehatan kota dalam pencegahan penyakit HIV? AIDS di Kota Samarinda*, *Ejurnal.ip.fisip-unmul.ac.id*.

Shuaida, N. (2016). *Pengelolaan pembangunan Desa*. jakarta.

Soekanto,soejono ; Sulistyowati,budi. (2017). *Sosiologi suatu pengantar*. jakarta PT Raja Grafinso persada.

### **skripsi**

Marselida, S (2020). *peran Dinas pariwisata Dan kebudayaan dalam melestarikan Kesenian Nndong di Kabupaten Simeulue Kecamatan Simeulue Tenga*.

### **Website**

Simeulue Cut,[id.m.wikipedia.org](http://id.m.wikipedia.org).

### **Peraturan Perundang-undang.**

Undang-undang No 6 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Desa.

Peraturan Menteri dalam Negri No 39 Tahun 2010 tentang BUMDes.

Peraturan pemerintah No 4 Tahun 2015 tentang Desa pasal 123 sampai 142.

Undang-undang No 22 Tahun 1999 pasal 108 tentang dasar pembentukan BUMDes.

## Lampiran

Daftar pertanyaan wawancara dengan judul Peran pemerintah Desa dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Desa Kuta Padang Kecamatan Simeulue Cut Kabupaten Simeulue yaitu :

i. Pertanyaan umum

1. Apa yang dimaksud dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)?
2. Apa nama dari program BUMDes yang sedang di kelolah?
3. Pentingkah pendirian BUMDes dilakukan untuk kemajuan Desa?
4. Jenis usaha apa saja yang sedang dikelolah saat ini?
5. Sejauh ini dalam pengelolaan BUMDes kendala apa saja yang muncul dan bagaimana cara menyelesaikan masalah tersebut?

ii. Pertanyaan khusus kepada Desa

1. Apa saja yang menjadi kewenangan kepala Desa dan apa saja yang tidak ?
2. Apakah Kepala Desa bisa mendirikan BUMDes tanpa bermusyawara kepada masyarakat?
3. Apakah pemecatan pengurus BUMDes boleh dilakukan oleh kepala Desa?

iii. Pertanyaan Khusus kepada ketua BPD ?

1. Bagaimana cara BPD dalam pengawasan BUMDes?
2. Apakah ada teknik atau cara dalam pengawasan BUMDes?

iv. Pertanyaan khusus kepada Direktur BUMDes

1. Siapa yang memili anggota pengurus BUMDes? Ketua/direktur BUMDes atau oleh forum BUMDes?



2. Apakah ada pembinaan Khusus yang dilakukan Pemerintah Desa kepada Pengurus BUMDes untuk mengelolah BUMDes?
- v. Pertanyaan Khusus kepada Bendahara BUMDes
1. Apa itu anggaran Dasar/anggaran rumah tangga (AD/ART) BUMDes?  
Bagaimana mekanismenya?
  2. Bagaimana cara menyusun rencana kegiatan dan keuangan BUMDes?
  3. Pernyataan modal awal BUMDes dari APBDes berapa?
  4. Apakah ada pembinaan Khusus yang dilakukan Pemerintah Desa kepada Pengurus BUMDes untuk mengelolah BUMDes?
- vi. Pertanyaan Khusus kepada sekretaris BUMDes
1. Bagaimana cara menyusun rencana kegiatan BUMDes?
  2. Apakah ada pembinaan Khusus yang dilakukan Pemerintah Desa kepada Pengurus BUMDes untuk mengelolah BUMDes?
- vii. Pertanyaan khusus kepada masyarakat ?
6. Apakah pemerintah Desa mensosialisasikan tentang BUMDes kepada Masyarakat?
  7. Apakah ada pembinaan Khusus yang dilakukan Pemerintah Desa kepada Pengurus BUMDes untuk mengelolah BUMDes?
  8. Bagaimkana pendapat saudara tentang Perogram BUMDes yang sedang di kelolah apakah berjalan dengan lancar?



DOKUMENTASI PEMERINTAH DESA DAN PENGURUS BUMDES



Dokumentasi dengan masyarakat Desa kuta padang



Dokumentasi dengan direktur BUMDes



Dokumentasi dengan bendahara BUMDES



Dokumentasi dengan masyarakat.